

Pemihakan pada Ekonomi Pertanian

Di negara-negara maju, di Jepang dan Eropa, sektor pertanian dilindungi pemerintah. Hal itu dilakukan karena disadari bahwa pada sektor pertanian melekat risiko tinggi untuk menghadapi kegagalan.

Pertama, sektor pertanian cukup besar ketergantungannya pada kondisi alam. Perubahan lingkungan alam, umpamanya bencana alam atau serangan hama, relatif sukar untuk diramalkan.

Kedua, infrastruktur perhubungan juga memberikan kendala. Kegiatan pertanian biasanya berlangsung di desa-desa, yang keadaan prasarana jalan dan angkutannya terbatas dan kondisi ini memberikan ongkos besar untuk mengangkut produk-produk pertanian ke pasar di perkotaan.

Ketiga, sebagian besar produk pertanian termasuk komoditas yang tidak tahan lama, karena itu sesegera mungkin harus dipasarkan. Dan keempat, permintaan akan komoditas pertanian tidak elastis, pangan termasuk kebutuhan dasar (*basic need*) yang apabila sudah tercukupi manusia cenderung tidak menambah permintaan dalam jumlah yang besar.

Kerentanan yang tinggi dari usaha pertanian itulah yang dipakai sebagai alasan untuk melakukan proteksi, yang diasumsikan, warga masyarakat yang sumber nafkahnya bergantung pada pertanian akan dihadapkan pada banyak kendala yang memiliki risiko besar pada tingkat kesejahteraannya.

Di samping itu, apabila usaha pertanian mengalami gangguan, ketahanan pangan (*food security*) akan ikut terganggu sehingga warga masyarakat yang tidak bertani juga akan dihadapkan pada kekurangan pangan.

Bias perkotaan

Bentuk-bentuk proteksi yang dilakukan di antaranya memberikan subsidi, terutama pada harga sarana produksi, keringanan bea ekspor, dan pembebanan yang besar pada bea impor untuk

produk pertanian luar negeri.

Akan tetapi, anehnya, banyak negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, memiliki kecenderungan tidak memberikan proteksi pada sektor pertanian ini.

Sebagai kasus bagaimana sektor pertanian ini diabaikan bisa dilihat dari kebijaksanaan ekonomi makro Indonesia. Di negara kita sektor pertanian dituntut menyediakan komoditas pangan dengan harga pasar yang murah dan stabil, dengan tujuan mengamankan keadaan ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Juga sudah umum diketahui, sektor pertanian dituntut untuk mendukung sektor industri dan jasa, dengan menyediakan bahan mentah dan baku serta pangan yang murah untuk masyarakat kota.

Kebijaksanaan mengenai perdagangan yang diterapkan di sektor pertanian adalah dengan mengenakan pajak ekspor yang tinggi. Kebijakan ini tidak memberikan rangsangan untuk meningkatkan produktivitas dan tidak mendorong pada kompetisi dengan produk-produk pertanian luar negeri.

Sebaliknya, pemerintah memperlakukan bea masuk yang sangat kecil bagi komoditas-komoditas pertanian impor. Ini menyebabkan masuknya besar-besaran ragam produk pertanian impor yang kualitasnya relatif lebih baik, tetapi dengan harga murah sehingga mengakibatkan banyak produk pertanian kita kalah bersaing.

Dengan demikian, sistem perdagangan yang berlaku di sektor pertanian tampaknya lebih memberikan rangsangan pada impor dibandingkan dengan ekspor. Itu berarti kurang memberi insentif kepada para petani untuk lebih giat dalam berusaha, malah menjadi kendala dan cenderung mendorong pada stagnasi usaha-usaha pertanian yang masih didominasi oleh pertanian rakyat yang tradisional yang skala usahanya kecil-kecil.

hanya sedikit pegiat Muhammadiyah yang peduli dengan itu.

Secara serampangan bisa dikatakan jangan-jangan rasionalitas yang dijanjikan oleh kemodernan hanyalah mimpi Immanuel Kant. Dalam kenyataannya, kemodernan yang didaku oleh banyak orang di sini terbatas pada penampakan luar. Ia membuat teknikalitas kehidupan semakin canggih dan manajemen organisasi semakin efisien, tetapi dalam dirinya terdapat lapisan yang bolong. Lapisan ini, yang pada tataran metafisika diatribusikan kepada akal budi, ternyata tak menempel pada tanah sejarah. Ia mengawang-awang di langit filosofis. Karena itu, ia mudah sekali terempas gelombang politik.

Dalam situasi krisis epistemologi kemodernan ini, tradisi muncul sebagai pusat orientasi baru yang menjanjikan. Jika mengikuti rumusan Alasdair MacIntyre, tradisi adalah sesuatu "yang berkembang secara historis, mempunyai argumen yang terwujud secara sosial". Tradisi dengan kriteria semacam ini menyediakan kepada para pengikutnya seperangkat keyakinan tentang dunia, beserta cara untuk mengatasi problemnya. Tradisi bagi MacIntyre adalah sebuah argumen rasional yang bekerja berdasarkan historisitas tertentu. Tanpa mengacu pada historisitas tertentu, rasionalitas mudah tergelincir pada relativisme dan perspektivisme.

Dengan demikian, tradisi yang kita maksudkan jelas berbeda dengan tradisi dalam bayangan postmodernisme yang nihilistik. Tradisi yang kita butuhkan sekarang harus tetap berada dalam horizon universalitas yang memuat kriteria obyektif tertentu. Selain itu, berlainan dengan kecenderungan postkolonialisme yang selalu melihat Barat dan Timur secara dikotomis, yang diperlukan oleh kita adalah tradisi yang tetap kritis pada dirinya sendiri.

Agama dan politik aliran

Kembali ke pokok bahasan, sekarang pesantren diharapkan signifikansinya dalam merawat wawasan kebangsaan karena lembaga-lembaga lain, yang berdiri di samping panji-panji kemodernan, memang sedang tidak bisa diharapkan. Lembaga-lembaga terakhir ini mengandung ambivalensi akut seperti panji-panji yang diusungnya. Namun, mengulang pertanyaan di awal, mengapa baru sekarang?

Pada masa Orde Baru, agama bukan sasaran pokok kegiatan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Dengan latar belakang pengurus inti yang umumnya adalah para priayi sekuler, BP7 belum secara spesifik memerhatikan kompleksitas masalah agama dalam rumusan-rumusannya. Gagasan yang menjadi narasi utama pada saat itu adalah kolektivisme dan integralisme yang berakar pada filsafat romantisme Eropa. Bourchier

(2015) menjelaskan bagaimana gagasan ini ditransmisikan dari Jerman ke Belanda, diimpor ke Indonesia, kemudian bercampur dengan paham serupa dari Jepang di era pendudukan mereka yang sebentar.

Oleh karena itu, jika hari ini pesantren dinilai punya signifikansi dalam penguatan ideologi Pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan, maka itu tiada lain merupakan refleksi dari penguatan politik identitas di zaman kita. Dalam hal ini, agama menempati hierarki tertinggi dalam politik identitas itu sehingga siapa pun tidak bisa berbicara mengenai Pancasila dan kebangsaan tanpa mengaitkannya dengan agama. Karena agama pada dasarnya merupakan seperangkat gagasan dan nilai yang abstrak, ia membutuhkan pengejawantahan yang konkret. Di Indonesia, bentuk dari pengejawantahan itu adalah pesantren.

Akan tetapi, tidak semua pesantren bisa mengikuti alur argumen ini. Tidak sedikit pesantren yang larut dalam gejala politik identitas tanpa sikap kritis. Tidak hanya pesantren modern seperti telah disinggung sedikit, tetapi juga terdapat pesantren tradisional yang kelihatan sekali sulit menerima Pancasila dalam pengertian hari ini. Bukan berarti mereka anti-Pancasila, melainkan cara menafsirkannya jauh dari wawasan kebangsaan yang terbuka.

Untuk mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dengan dunia pesantren hari ini, kita tentu butuh riset yang serius. Akan tetapi, melalui pengamatan yang sederhana kita bisa melihat bahwa kedudukan pesantren dan tempatnya dalam peta sosial politik di dekade kedua abad ke-21 sekarang tidak jauh beranjak dengan gambaran mengenai situasi yang sama pada dekade 1950-an. Kembalinya agama ke ruang publik berarti kembalinya konsepsi "politik aliran" dalam menjelaskan realitas sosial. Trikotomi priayi-santri-abangan seperti dieksplorasi oleh Clifford Geertz (1983) menemukan relevansinya kembali. Pasti ada perubahan di sana-sini, tetapi pola besar dan aliansi atau kontradiksi di antara ketiga aliran tersebut tetap bertahan dengan sedikit modifikasi.

Dengan mengarahkan kembali lensa pemahaman kepada gambaran dekade 1950-an, kita akan terbantu untuk melihat hubungan antara pesantren, Pancasila, dan wawasan kebangsaan di masa sekarang. Pada tataran analitis, kata kuncinya adalah genealogi. Pesantren yang secara genealogis terhubung dengan bayangan politik Darul Islam dan Masyumi umumnya cenderung skeptis, bahkan terkadang resisten, dengan penafsiran Pancasila yang terbuka (bdk. Martin van Bruinessen, 2002). Mereka setuju dengan Pancasila, tetapi muatan ideologi Islamis dalam kesadaran historis mereka lebih mengarahkannya pada penafsiran Pancasila versi Piagam Jakarta.

Politik identitas di dunia pesantren tidak bisa dicegah, tetapi bisa dipilah. Oleh karena itu, selain pesantren tradisional, pertanyaan lanjutannya adalah pesantren tradisional yang mana? Meski tidak bisa digeneralisasi secara gampang, saya melihat pesantren tradisional yang secara genealogis terhubung dengan tradisi Nahdlatul Ulama punya signifikansi yang lebih besar dalam memperkuat ideologi Pancasila dengan wawasan kebangsaan yang terbuka. Mungkin ini adalah harapan yang terlalu besar, tetapi mengapa tidak?